

**ANALISA HUKUM ATAS IMPLIKASI PERATURAN MENTERI
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 12 TAHUN
2019 TENTANG KAPASITAS PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI BERDASARKAN IZIN
OPERASI**

SKRIPSI

Oleh

**Enita Rosdiana Nainggolan
2040057027**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

**ANALISA HUKUM ATAS IMPLIKASI PERATURAN MENTERI
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 12 TAHUN
2019 TENTANG KAPASITAS PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI BERDASARKAN IZIN
OPERASI**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia**

Oleh

**Enita Rosdiana Nainggolan
2040057027**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Enita Rosdiana Nainggolan

NIM : 2040057025

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “Analisa Hukum Atas Implikasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Berdasarkan Izin Operasi” adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 06 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



Enita Rosdiana Nainggolan
NIM: 2040057027



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Oleh:

Nama : Enita Rosdiana Nainggolan
NIM : 2040057027
Program Studi : Hukum
Peminatan/Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
Judul : Analisa Hukum Atas Implikasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Berdasarkan Izin Operasi.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 06 Februari 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

(Dr. Poltak Siringoringo, S.H.,M.H.)
NIDN/NIDK: 0326116401

Pembimbing II

(Tomson Situmeang SH., M.H.)
NIDN/NIDK: 0325028101

Ketua Program Studi Hukum

(Dr. Rr. Ani Wijayati S.H., M.Hum.)

Dekan



(Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.)



PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 06 Februari 2022 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Enita Rosdiana Nainggolan
NIM : 2040057027
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Judul : Analisa Hukum Atas Implikasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Berdasarkan Izin Operasi.

oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Peguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
--------------------	----------------------------------	---------------------

1. Dr. Poltak Siringoringo, S.H.,M.H. Ketua

2. Tomson Situmeang SH., M.H. Anggota

3. I. Dewa Ayu Widyani S.H.,M.H. Anggota



Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Enita Rosdiana Nainggolan

NIM : 2040057027

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

Jenis Tugas Akhir : Skripsi

Judul : Analisa Hukum atas Implikasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Berdasarkan Izin Operasi.

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta
Pada Tanggal 06 Februari 2023
Yang menyatakan



Enita Rosdiana Nainggolan

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yesus, atas karuniaNya, bahwa Skripsi saya yang berjudul **“Analisa Hukum Atas Implikasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Berdasarkan Izin Operasi”**, dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Adapun judul ini dipilih berdasarkan pengalaman penulis dalam menghadapi permasalahan sertifikasi kelaikan Operasi. Penulis sebagai Widyaisuara di Kementerian ESDM merasa perlu untuk menganalisa Permen dimaksud sebagai tanggungjawab hukum atas pelatihan-pelatihan sertifikasi yang dilakukan selama ini untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dan pegawai negara dalam keperdulian akan keselamatan ketenagalistrikan.

Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif didukung pendekatan kualitatif. Dari analisa hukm atas implikasi peraturan ini dinilai memiliki unsur kepastian hukum, namun bisa multitafsir karena pada peraturan diatasnya tidak ada batasan kapasitas wajib memiliki sertifikat laik operasi, dan pengaruhnya adalah instalasi pembangkit tenaga listrik untuk pemakaian sendiri menjadi tidak aman atau rawan bahaya. Kemudian secara manfaat permen dimaksud belum mencerminkan tujuan umum peraturan dibuat yaitu memberikan jaminan keselamatan ketenagalistrikan yang diberlakukan kepada seluruh instalasi pembangkit tenaga listrik yang ada di masyarakat.

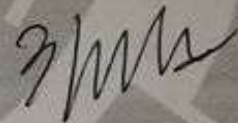
Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Suami tercinta Ir. Sukses Simanjuntak S.H.,M.H., M.M.,M.Min, yang selalu penuh dukungannya untuk kuliah dan penyelesaian tugas akhir ini, demikian juga anak-anakku tersayang Andre Sumanta Yesyurun S.T., Naomi Miryam S.M., M.M., dan Willyam Christian, yang tetap memberikan dorongan selama kuliah dan dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Dr. Poltak Siringoringo S.H., M.H. dan Bapak Tomson Situmeang, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing, yang telah membimbing dan mengarahkan penyelesaian skripsi ini.

3. Bapak Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum atas dukungannya untuk penyelesaian kuliah saya.
 4. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati S.H., M.Hum, selaku Kaprodi Hukum dan yang telah mendukung penyelesaian skripsi ini.
 5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UKI, yang telah mengajar saya dengan serius sehingga banyak ilmu dan pengalaman yang diajarkan menjadi pemahaman yang baik buat saya dalam menjalani karir selanjutnya.
 6. Rekan-rekan mahasiswa angkatan kelas karyawan tahun 2020, atas semua supportnya, sehingga perkuliahan dan skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.
 7. Staf administrasi Fakultas Hukum Mbak Adel, Mas Indra, dan lain-lain, yang telah memberikan support untuk penyelesaian kuliah dan skripsi ini.
- Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan saran dan masukan untuk penyempurnaannya.

Jakarta, 06 Februari 2023

Penulis,



Enita Rosdiana Nainggolan/

NIM 1902190804

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
HALAMAN PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup Penelitian	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	5
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Ketenagalistrikan	14
B. Sertifikat Laik Operasi	17
C. Teori Kepastian Hukum	18
D. Teori Kemanfaatan Hukum (<i>Utiliarisme</i>)	31
BAB III ATURAN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN DIHUBUNGKAN DENGAN SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SLO) PEMBANGKIT UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI	40
A. Hierarchy Penerbitan Aturan Keselamatan Ketenagalistrikan	40
B. Keselamatan Ketenagalistrikan	44

C. Peraturan Keselamatan Kelistrikan dengan Sertifikat Laik Operasi	47
BAB IV IMPLIKASI PERMEN ESDM NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG KAPASITAS PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI BERDASARKAN IZIN OPERASI TERKAIT DENGAN SERTIFIKAT LAYAK OPERASI	49
A. Implikasi Sertifikasi Laik Operasi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum.	49
B. Implikasi Sertifikasi Laik Operasi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Untuk Kapasitas Lebih Dari 500 KVA	62
C. Ketentuan Pelaksanaan Sertifikat Laik Operasi	64
D. Proses Registrasi, Hak dan Kewajiban Serta Sanksi Pemegang SLO.	68
E. Analisa Hukum	70
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78

ABSTRAK

- A. Nama : Enita Rosdiana Nainggolan
B. NIM : 2040057027
C. Judul : Analisa Hukum Atas Implikasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Berdasarkan Izin Operasi.
D. Kata Kunci : Keselamatan kelistrikan, Izin Operasi, Sertifikat Laik Operasi.
E. Halaman : 80 Halaman
F. Daftar Acuan : 28 Buku, 27 Perundang-undangan, 4 Website
G. Ringkasan Isi:

Tenaga Listrik merupakan komoditi yang sangat penting bagi masyarakat. Penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik harus dikelola atau dalam pengawasan pemerintah, juga dengan memperhatikan keamanan instalasi, keselamatan manusia, dan lingkungan hidup di sekitar instalasi. Disamping bermanfaat bermanfaat bagi masyarakat tenaga listrik menjadi sesuatu hal yang bisa mengakibatkan bahaya keselamatan. Pemerintah sebagai regulator mengatur tentang keselamatan ketenagalistrikan ini yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Peraturan yang berkaitan dengan Keselamatan Ketenagalistrikan juga diatur dengan penerbitan Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2019 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri berdasarkan Izin Operasi.

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menganalisa perundang-undangan yang berlaku didukung penelitian kuantitatif. Dengan berlakunya ketentuan batas total kapasitas pembangkit tenaga listrik yang di atas 500 kVA dalam 1 (satu) sistem instalasi tenaga listrik berdasarkan Permen ESDM 12 Tahun 2019, maka izin operasional diatas 200 kVA — 500 kVA tidak menjadi kewajiban bagi usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. Izin operasional dalam batasan 200 kVA-500 kVA dapat diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi. Pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri dengan jumlah kapasitas lebih dari 500 (lima ratus) kVA yang dihubungkan dalam 1 (satu) sistim Instalasi Tenaga Listrik diwajibkan mempunyai SLO. Aturan pelaksanaan dalam pembatasan kapasitas ijin operasi kelistrikan untuk kepentingan sendiri harus tetap memperhatikan keLaikan operasi yang ditentukan dengan sertifikat Laik operasi pembangkit. Disarankan agar aturan pelaksanaan Peraturan Menteri ESDM atas pembatasan kapasitas kan keLaikan operasi pembangkit listrik harus selaras dengan UU No.30 pasal 44 s/d 46 harus memiliki sertifikat Laik Operasi dan Peraturan Menteri ESDM nomor 12 tahun 2019 harus dirubah dengan menambahkan kausul kewajiban semua pembangkit listrik tanpa membatasi kapasitas pembangkit untuk kepentingan sendiri harus memiliki sertifikat Laik Operasi.

- H. Dosen Pembimbing I : Dr. Poltak Singiroringo, S.H., M.H.
Dosen Pembimbing II: Tomson Situmeang S.H., M.H.

Jakarta, 06 Februari 2023
Penulis

Enita R. Nainggolan

ABSTRACT

- A. Name : Enita Rosdiana Nainggolan
B. NIM : 2040057027
C. Title : *Legal Analysis of the Implications of the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 12 of 2019 concerning the Capacity of Power Generation for Own Interests Based on Operating Permits*
D. Keywords : *Electrical Safety Operation Permit, Operation Worthy Certificate.*
E. Pages : 80 Pages
F. Reference List : 28 Books, 27 Legislations, 4 Websites.
G. Summary of Contents:

Electricity is a very important commodity for society. The supply and use of electric power must be managed or under government supervision, also taking into account installation security, human safety, and the environment around the installation. Besides being useful for the community, electric power is something that can cause a safety hazard. The government as the regulator regulates electricity safety as outlined in the Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2009 concerning Electricity. Regulations related to Electricity Safety are also regulated by the issuance of Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 12 of 2019 concerning Power Generation Capacity for Own Interest based on an Operating Permit.

The research method used is the normative legal research method by analyzing the applicable laws supported by quantitative research. With the enactment of the regulation on the total power generation capacity limit of more than 500 kVA in 1 (one) power installation system based on Minister of Energy and Mineral Resources 12 of 2019, operational permits above 200 kVA - 500 kVA are not mandatory for businesses providing electricity for their own interests. . Operational permits within the range of 200 kVA-500 kVA can be issued by the Provincial Government. Power plants for their own needs with a total capacity of more than 500 (five hundred) kVA connected in 1 (one) Electric Power Installation system are required to have SLO. The implementation rules in limiting the capacity of electricity operating permits for their own interests must still pay attention to the feasibility of operation as determined by the generator operation worthiness certificate. It is recommended that the implementation rules of the Minister of Energy and Mineral Resources regarding capacity restrictions and the feasibility of operating power plants must be in line with Law No. 30 articles 44 to 46 must have a certificate of Operational Worthiness and Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources number 12 of 2019 must be amended by adding a clause on the obligations of all power plants without limiting the generating capacity for its own interests must have a certificate of Operation Worthiness.

- H. Supervisor: 1. Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.
2. Tomson Situmeang S.H., M.H.

Jakarta, 06 February 2023
Penulis

Enita R. Nainggolan